

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.H. Tanjung. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- C.S.T Kansil. *Desa Kita dan Peraturan Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1998.
- Cusway & Lodge (Alih Bahasa Tjipto Wardoyo). *Perilaku dan Desain Organisasi*. Jakarta: Elek Media Komputindo, Kelompok Gramedia, 1999.
- Damanik dalam Ihyaul Ulum. *Intellectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- H.A.W. Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kariangan, Hendra. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana, 2007.
- M. Manullang, *Dasar-Dasar Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia 1977.
- Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Seatara Press, 2014.
- Ndraha, Talizidhuhu. *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Garsindo, 2007.
- P. Siagian, Sondang. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rhineka Cipta, 2003.
- Purnomo, Joko & Tim Infest. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest, 2016.
- S.D. Aditya. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus Desa*

- Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.
- Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Cetakan XVI (Enam Belas)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Simanjutak, Bungaran Antonius (ed). *Otonomi Daerah, Etninasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansyah. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Sugiyono. *Memahami Metode Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sukmadinata dan Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- V.W. Sujarweni. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 2004.
- Wahyu, Ramdani. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV Pustaka Setya, 2007.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jurnal**
- Alaslan, Amtai. *Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa*. Jurnal AdBisPower-STIA Saumlaki, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Ariawan, I Gusti Ketut. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kentha Wijaya Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2023.

Hanifah, Suci Indah. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 4, Nomor 8, 2015.

Kushandajani. *Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Semarang*. Jurnal Ilmu Politik, Volume 6, Nomor 2, 2016.

Ruslinawati, Ni Wayan. *Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Widiastutiningrum, Eva. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Wawancara

Moh Djaenoel, Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus periode tahun 2019-2025, (Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus: 28 Desember, 2023).

Artikel

Sadya, Sarnita Sadya. *ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi di Desa pada 2022*. (Data Indonesia: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>, diakses 2 September 2023, 2023).

Gozali, Rifqi. *Mantan Kepala Desa Undaan Lor Kudus Terancam Pidana 20 Tahun Penjara*. (Tribun Muria: <https://muria.tribunnews.com/2022/10/20/mantan-kepala-des-undaan-lor-kudus-terancam-pidana-20-tahun-penjara#:~:t>, diakses 2 September 2023).